



e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 2 Tahun 2021 Hal. : 293-302

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosialavailable online <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>**PEMBINAAN DAN PEMBERIAN HAK-HAK WARGA BINAAN DI LAPAS****Alfonsius Sinabang**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan baik proses, tujuan maupun hambatan yang dihadapi. Lapas merupakan wadah bagi para narapidana untuk memberikan pembinaan berdasarkan upaya sistem pemasarakatan untuk mencapai pembedaan yang komprehensif. Hukuman yang komprehensif merupakan upaya untuk melatih narapidana dan mengembalikannya ke komunitas yang bermanfaat dan menguntungkan. Dengan kata lain, ketika lembaga pemasarakatan menerapkan sistem pemasarakatan, para narapidana dan masyarakat dipulihkan, dikurangi, disosialisasikan kembali, dan dilindungi. Dengan kata lain Lembaga pemasarakatan melaksanakan serangkaian proses yang disebut dengan program pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan yang berada di Lapas. Dengan dilaksanakannya program pembinaan ini maka diharapkan setelah WBP menjalani masa pidananya, ia dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan lebih baik sehingga keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat tempat ia tinggal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Hukuman, maka pengembangan narapidana di Lapas melalui penggunaan sistem pidana dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan; kesadaran beragama; pemahaman masyarakat dan kelompok etnis dan memiliki sense of law yang kuat; kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan; dan integrasi diri dengan masyarakat. Sarana / prasarana yang ada terbatas; sumber daya manusia; dan, karena masyarakat luas tidak mendampingi narapidana secara memadai, faktor ini tidak menghalangi implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sistem pemasarakatan, yang merupakan tahap akhir dari operasi sistem peradilan pidana, memandu keberhasilan narapidana dan sangat dipengaruhi oleh tahap peninjauan awal yang dilakukan oleh subsistem peradilan pidana lainnya. Kondusif bagi kegiatan narapidana, sarana dan prasarana di Lapas, menerima sikap narapidana terhadap petugas dan melaksanakan pembinaan atas dasar kelancaran sistem pemasarakatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modus pembinaan narapidana di Lapas dapat digunakan. untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana Tujuan pembedaan dicapai dalam bentuk yang lebih formal, yaitu tujuan dari sistem peradilan pidana jangka pendek.

Kata Kunci: Pembinaan, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana

*Correspondence Address : alfonsius3004@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i2.2021.293-302

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Lapas merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tugas utamanya adalah memperbaiki narapidana / Anak didk Pemasarakatan. Salah satu fungsi Lembaga Pemasarakatan adalah menjalankan fungsi pembinaan, yaitu proses pelaksanaan reformasi pidana sistem Lapas (dahulu disebut Penjara), serta proses pembinaan terhadap narapidana yang memperlakukan mereka sebagai makhluk, individu dan anggota masyarakat. Tujuan pembinaan narapidana berdasarkan sistem kedisiplinan adalah untuk memperkuat keyakinan dan menumbuhkan keyakinannya, sehingga narapidana dapat menjadi manusiawi seutuhnya dalam arah pembangunan nasional, sehingga dapat diintegrasikan secara adil ke dalam kehidupan kolektif ke masyarakat setelah melakukan kejahatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Penjelasan umum mencakup pernyataan bahwa tujuan penghukuman adalah untuk membuat narapidana dan anak kriminal menyesali perbuatannya, menjadikan mereka warga negara yang baik, taat hukum, dan menjaga nilai-nilai moral, sosial dan agama, sehingga tercapainya keamanan dan ketertiban. Kehidupan komunitas yang damai. Sebagai lembaga pembangunan dan penegak hukum, Lembaga Pemasarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terintegrasi. Selain sebagai penegak hukum, lembaga pemasarakatan juga memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sesuai dengan peran Lembaga Pemasarakatan, sudah sepantasnya menunjuk petugas Lapas

yang bertanggung jawab membesarkan dan melindungi narapidana sesuai dengan undang-undang ini sebagai petugas fungsi penegakan hukum. Dalam proses pemasarakatan, narapidana akan mendapatkan perkembangan kepribadian dan kemandirian yang pada dasarnya berarti narapidana akan kembali ke masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan narapidana untuk menjaga kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.

Bagaimanapun pengembalian narapidana ke masyarakat merupakan tujuan akhir dari pemasarakatan sehingga harus dilaksanakan program yang baik bagi mereka yang menunjang kehidupan mereka di masyarakat kelak. Sejak Sahardjo mengemukakan sistem pemasarakatan, konsep pemasarakatan di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dalam pidato bertajuk "Pohon Beringin Pengayoman", konsep pengakuan kepada narapidana adalah sebagai berikut: memimpin taubat, mendidik mereka, dan menjadikan mereka anggota masyarakat sosialis yang berguna di Indonesia". Baru setelah tahun 1995 "Undang-undang Nomor 12 tentang Pemasarakatan" diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, sistem pemasarakatan dapat digunakan sebagai sistem pembinaan bagi warga negara di lembaga pemasarakatan. Indonesia No. 77 dan Tambahan lembaran negara Republik Indonesia; 13641. Filosofis Pemasarakatan adalah sistem penghukuman yang telah bergeser dari filosofi retribusi (retaliation), deterrence (deterrence), dan resosialisasi. Dengan kata lain, misalkan kejahatan tersebut merupakan konflik antara terpidana dengan masyarakat sehingga tujuan

penghukuman adalah untuk memulihkan konflik atau mempertemukan terpidana dengan komunitasnya (reintegrasi). Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur: "Sistem Pemasyarakatan adalah tentang penataan, pengawasan, dan pengawasan arah, batas-batas, dan tata cara pembinaan dan pembinaan warga negara berdasarkan Pancasila. kualitas warga negara, untuk menemukan kesalahan, meningkatkan kualitas diri, dan menghindari tindak pidana berulang sehingga masyarakat dapat menerima dan memberikan bantuan korektif dapat berperan aktif dalam masyarakat. Pembangunan dengan sendirinya dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. ". Kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan: "Sistem pemasyarakatan diterapkan agar Narapidana menjadi orang yang memadai, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga mereka dapat memperoleh kembali tempat di masyarakat. Pengakuan rakyat dapat menjadi aktif, berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara alami sebagai warga negara yang bertanggung jawab. "

Pemasyarakatan masih meyakini bahwa kejahatan terjadi karena adanya keretakan hubungan antara pelaku dan masyarakat yang menyangkut hidup, penghidupan dan kehidupan. Oleh karena itu fungsi pemasyarakatan itu sendiri adalah membina dan memberikan hak-hak narapidana selama di dalam lapas.

2. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana program pembinaan di Lapas serta pemberian hak Narapidana. Adapun manfaat yang

diharapkan dari penelitian ini adalah kita mengetahui bagaimana proses pembinaan, pihak terlibat dan tujuan pembinaan.

3. Kajian Teori

a. Pengertian pemasyarakatan

Sejak Sahardjo mengemukakan sistem Pemasyarakatan, konsep penghukuman di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dalam pidato bertajuk "Pohon Beringin Pengayoman" konsep pengakuan narapidana adalah sebagai berikut: memimpin taubat, mendidik mereka, dan menjadikan mereka anggota masyarakat sosialis yang berguna di Indonesia. Baru setelah tahun 1995 "Undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan" diundangkan (diundangkan dalam "Lembaran Negara Republik" pada tanggal 30 Desember 1995), sistem pemasyarakatan dapat digunakan sebagai sistem perawatan bagi warga negara di lembaga pemasyarakatan dalam lembaran Republik Indonesia No. 77 dan Tambahan lembaran Republik Indonesia; 13641. Pemasyarakatan masih meyakini bahwa kejahatan terjadi karena adanya keretakan hubungan antara pelaku dan masyarakat yang menyangkut hidup, penghidupan dan kehidupan. Oleh karena itu fungsi pemasyarakatan itu sendiri adalah membina dan memberikan hak-hak narapidana selama di dalam lapas.

Pemasyarakatan merupakan transformasi dari pemenjaraan dimana pemasyarakatan jauh dari kesan kejam penjara, tidak ada diskriminasi, pelanggaran ham dan tujuan akhir adalah mengembalikan narapidana ke masyarakat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur: "Sistem Pemasyarakatan adalah tentang penataan, pengawasan, dan pengawasan arah, batas-batas, dan tata

cara pembinaan dan pembinaan warga negara berdasarkan Pancasila. kualitas warga negara, untuk menemukan kesalahan, meningkatkan kualitas diri, dan menghindari tindak pidana berulang sehingga masyarakat dapat menerima dan memberikan bantuan korektif dapat berperan aktif dalam masyarakat. Pembangunan dengan sendirinya dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab". Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan: "Sistem pemasyarakatan diterapkan agar Narapidana menjadi orang yang memadai, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga mereka dapat memperoleh kembali tempat di masyarakat. Pengakuan rakyat dapat menjadi aktif, berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara alami sebagai warga negara yang bertanggung jawab. "

Transformasi dari sistem penjara ke sistem Pemasyarakatan telah membawa perubahan mendasar dalam cara perlakuan terhadap narapidana. Pemasyarakatan terdiri dari pihak yang terdiri dari: narapidana, Anak Binaan dan Klien Bapas yang subjek pembinaan, mereka dianggap sebagai individu dan warga negara biasa, mereka tidak dihadapkan pada latar belakang balas dendam tapi pembinaan.

Sistem pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan narapidana yang lebih manusiawi dan normatif berdasarkan Pancasila yang bercirikan: rehabilitasi, koreksi, pendidikan dan kelengkapan, atau pengaturan mengenai arah dan batas, dan berdasarkan metode pelatihan Pancasila bagi narapidana dilaksanakan secara terpadu. sikap antara supervisor, pelatih dan publik. Sistem pemasyarakatan mengandung prinsip pembinaan narapidana dengan cara yang lebih manusiawi, hal ini tercermin

dari pembinaan yang dilakukan dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan UU Pemasyarakatan dimana narapidana dan Anak didik menjadi manusiawi sepenuhnya.

b. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Semua hak melekat pada seseorang dan harus diterima. Pada saat yang sama, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua aspek yang berbeda. Pertama, hak terkait kesepakatan. Kedua, hak terkait dengan kepribadian, hubungan darah, dan objek material. Masing-masing pengelompokan ini mengungkapkan apakah hak melekat pada individu. Salmond percaya bahwa hak dapat dibagi menjadi empat bagian penting. Pertama, seseorang bisa mendapatkan hak selama dia memenuhi kewajibannya. Kedua, seseorang dapat menggunakan haknya selama tidak mengganggu orang lain. Ketiga, seseorang dapat memperoleh haknya melalui kekuasaan, status, dan jalur hukum lainnya; keempat, seseorang berhak memutuskan hubungan dengan orang lain. Sebagai pribadi, warga negara binaan tentunya memiliki hak-hak yang harus direalisasikan dan tidak dapat diperoleh. diabaikan. Kehilangan kemerdekaan seharusnya menjadi satu-satunya penderitaan yang diderita narapidana. Ketika kita memiliki hak seseorang termasuk narapidana, maka dengan sendirinya kita melakukan kesalahan dan menimbulkan rasa sakit bagi orang lain.

Dalam KBBI, narapidana adalah narapidana (orang yang dihukum karena kejahatan); dikutuk. Pada saat yang sama, menurut kamus istilah-istilah ilmiah utama, dinyatakan bahwa narapidana adalah narapidana; orang dalam boks bayi. Selain itu, menurut

kamus hukum pengertian narapidana adalah sebagai berikut: narapidana adalah orang yang menjalani hukuman di penjara. Padahal, sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pidana, narapidana adalah pelaku kejahatan yang telah kehilangan kebebasan menjalani masa hukumannya di lembaga pidana. Menurut Pasal 1 ayat (6) Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, terpidana adalah orang yang dipidana sesuai dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa narapidana adalah seseorang yang di hukum di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaan dihilangkan dengan paksa. Sebagai manusia, narapidana tidak dapat dipandang sebagai manusia yang kotor dan tidak layak untuk diperlakukan sebagaimana manusia yang harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pembahasan setiap masalah dalam artikel ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang diperoleh, penelitian ini merupakan penelitian survei atau disebut juga penelitian lapangan, yang dilakukan di Lapas / Rutan sehingga segala bentuk pertanyaan dapat terjawab.

2. Penelitian Sifat

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data terlebih dahulu kemudian menganalisis data yang terkumpul berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

3. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengalaman hukum, yaitu metode hukum yang memeriksa konsep normatif atau peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan metode empiris memeriksa fakta-fakta yang ditemukan di tempat.

1. Sumber data

Untuk memudahkan penelitian maka data diambil dari sumber data utama yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Data utama

Data utama dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama (yaitu narapidana dan petugas di Lapas / Rutan).

b. Data tambahan

Data yang penulis mendukung penelitian ini bersumber dari dokumen tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan.

c. Data ketiga

Selain data utama dan data lainnya, sumber pendukung lainnya antara lain kamus hukum, internet, dan sumber data lain yang diperoleh langsung dari penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner dan Wawancara

Dengan menyebarkan kuesioner kepada 10% (sepuluh) dari seluruh narapidana binaan. Sedangkan metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, yang sifat wawancaranya adalah terbuka, yaitu menanyakan kepada orang yang diwawancarai dengan cara yang tidak terbatas pada pemberian informasi.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan membaca, meneliti dan mengkaji data baik berupa buku, undang-undang maupun bahan pustaka.

ANALISA DATA

Metode analisis data dalam penyelidikan dan penelitian dilakukan melalui analisis kualitatif, yaitu teknik analisis data yang menginterpretasikan data yang direncanakan dalam penelitian dan terakhir menarik kesimpulan penelitian deduktif, yaitu kesimpulan. Dari hal umum hingga hal khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan bagi narapidana adalah upaya untuk mencapai reintegrasi sosial, yaitu memulihkan kehidupan, kehidupan dan penghidupan, baik sebagai individu, makhluk sosial maupun ciptaan Tuhan dan masyarakat. Tujuan pembinaan narapidana berdasarkan sistem kedisiplinan adalah untuk memperkuat keyakinan dan menumbuhkan keyakinannya agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya seperti arah pembangunan nasional, sehingga dapat diintegrasikan secara adil ke dalam kehidupan berkelompok di Lapas dan Lapas dan setelah bebas.

UU Nomor 12 tahun 1995 dalam tafsir umum menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk membuat anak didik dan narapidana yang dibantu menyesali perbuatannya, menjadikan mereka warga negara yang baik, patuh pada hukum, menjaga moral dan nilai-nilai sosial, serta mewujudkan kehidupannya. Keyakinan agamanya adalah masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sebagai lembaga pembangunan dan penegakan hukum, penjara (Lapas) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terintegrasi. Selain peran aparat penegak hukum, Lapas juga memiliki peran strategis

dalam membentuk sumber daya manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas, dan bermartabat. Sesuai dengan peran lembaga pemasyarakatan, maka disarankan untuk menunjuk aparat pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas membesarkan dan melindungi narapidana dalam undang-undang ini sebagai aparat penegak hukum. Dalam proses pemasyarakatan, narapidana memiliki kemampuan untuk mengembangkan kepribadian dan perkembangan kemandirian yang pada dasarnya berarti mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Oleh karena itu, kegiatan konseling harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan narapidana guna menjaga kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Dalam peraturan dan tata cara pelaksanaan hak-hak WBP PP Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 2, pembinaan merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kecerdasan, sikap dan perilaku. Kegiatan, pekerjaan, kesehatan, narapidana dan pendidik Tuhan Yang Maha Esa.

Hakikat dan Prinsip Dasar Pembinaan Secara umum penerimanya adalah orang biasa, dan norma-norma tertentu akan menyebabkan seseorang menjadi narapidana, oleh karena itu mereka harus menerapkan prinsip-prinsip dasar bimbingan dalam perkembangannya. Prinsip dasar tersebut menurut Harsono terdiri dari 4 (empat) komponen pembinaan, yaitu:

- a. Narapidana itu sendiri
- b. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat,
- c. Komunitas adalah orang-orang di sekitar narapidana yang masih berada di luar Lapas / Rutan negara, baik itu orang

biasa, tokoh masyarakat, atau aparat setempat.

- d. Petugas bisa berupa polisi, pengacara, pejabat agama, pejabat sosial, petugas pemasyarakatan.

Secara umum pembinaan dilakukan melalui 3 (tahapan), yaitu:

- a. Tahap awal penyuluhan adalah kegiatan observasi, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan kepribadian dan rencana mandiri. Kegiatan ini dimulai dengan terpidana terhitung 1/3 dari jumlah keseluruhan tindak pidana. Konsultasi pada tahap ini masih dalam penjara, dan pengawasan adalah jaminan keamanan tertinggi untuk pengembangan kepribadian dan perencanaan mandiri.

- b. Tahap lanjutan pembinaan merupakan kelanjutan dari rencana pengembangan kepribadian dan kemandirian untuk menentukan perencanaan dan pelaksanaan rencana asimilasi. Tahap lanjutan ini terdiri dari dua bagian, tahap pertama dimulai saat terpidana mencapai 1/2 (setengah) dari masa hukumannya. Pada tahap ini konsultasi masih terus dilakukan di dalam dan di luar Lapas, dan pengawasan sudah memasuki tahap pengamanan perantara. Tahap kedua dimulai pada akhir periode lanjutan pertama dan mencapai 2/3 (dua pertiga). Pada tahap lanjutan ini, narapidana telah memasuki tahap asimilasi untuk mempersiapkan tahap integrasi, dan kemudian dapat diizinkan untuk pergi atau pembebasan bersyarat di bawah pengawasan keamanan minimal.

- c. Tahap terakhir adalah coaching after parole (PB). Pelaksanaan program integrasi dimulai pada akhir tahap lanjutan kedua, yaitu dimulai dari 2/3 periode pidana, pada tahap ini pengawasan narapidana memasuki

tingkat pengamanan paling rendah hingga akhir masa hukuman. Tahanan ada di komunitas. Dalam proses ini, Lembaga Pemasyarakatan (Bapas) akan membantu

Mengenai tahap pembinaan bagi narapidana, tujuannya adalah untuk mempersiapkan narapidana serta anak didik agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat, sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Mengenai perkembangan narapidana, dikatakan bahwa “pedoman terbaik bagi narapidana agar berhasil menjalani hukumannya dan dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi perbuatannya adalah bimbingan nabi sendiri”. Pengembangan mandiri. Pembinaan Kepribadian meliputi:

- a. Pembangunan kesadaran nasional.
- b. Perkembangan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- c. C. Membangun kesadaran hukum.
- d. Pembinaan dan integrasi sosial.

Pengembangan mandiri meliputi:

- a. Satu. Keterampilan untuk mendukung bisnis mandiri.
- b. Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.
- c. Keterampilan menggunakan teknologi menengah atau teknologi tinggi untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.

Pengembangan kepribadian bertujuan untuk membentuk mentalitas dan karakter yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pada saat yang sama, kemandirian bertujuan untuk menumbuhkan bakat dan keterampilan sehingga asisten lapas dapat memulihkan statusnya sebagai anggota

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 11 Konsep dasar kemerdekaan tidak lepas dari keputusan Menteri Kehakiman. Peraturan M.02-PR.04.10 Republik Indonesia tentang Model Pengembangan Narapidana / Narapidana Tahun 1990, "Pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan adalah segala upaya yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan moral narapidana dan Andikpas. Meskipun pernyataan tersebut tidak mengandung kata-kata yang memiliki arti khusus bagi pembangunan mandiri, namun pelaksanaannya seperti yang dijelaskan pada Bab 7 Undang-undang. Undang-Undang tersebut. Menurut penjelasannya, ruang lingkup pembinaan meliputi pengembangan kemandirian, antara lain:

- a. Mendukung kegiatan usaha mandiri, seperti kerajinan tangan, produk elektronik dan lain-lain;
 - b. Mendukung kegiatan usaha industri kecil, seperti pembuatan batako, pengerasan jalan, dll.;
 - c. Kegiatan yang mendukung pekerjaan pemberdayaan lahan pertanian, seperti peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dll.
6. Memperoleh bahan bacaan dan memperhatikan siaran media massa lain yang tidak dilarang
 7. Dapatkan gaji atau premi untuk pekerjaan yang telah diselesaikan
 8. Terima kunjungan dari anggota keluarga, penasihat hukum, atau orang lain
 9. Pergantian (pergantian)
 10. Memiliki kesempatan untuk berasimilasi, termasuk liburan mengunjungi kerabat
 11. Pembebasan Bersyarat
 12. Beristirahatlah sebelum istirahat
 13. Mendapatkan hak lain sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini.

Kemudian dalam hal pemberian program pembinaan tersebut, narapidana juga harus diberikan hak-haknya sebagai narapidana yang telah diatur oleh Undang-undang. Adapun hak-hak tersebut antara lain:

1. Ibadah menurut agama atau kepercayaan.
2. Terima perawatan mental dan fisik.
3. Menerima pendidikan dan pengajaran
4. Dapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Mengajukan keluhan

Pelaksanaan mengenai hak-hak narapidana terdapat dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam PP ini diatur tentang pelaksanaan hak bagi WBP. Misalnya pada Bab II Peraturan pemerintah ini diatur tentang pelaksanaan hak melakukan ibadah bagi WBP. Dimana setiap WBP wajib diberikan hak untuk melakukan ibadah, baik di dalam maupun di Luar Lembaga Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan juga seharusnya memiliki petugas yang memberikan bimbingan keagamaan bagi WBP. Dan semua WBP wajib mengikuti kegiatan bimbingan tersebut.

Warga Binaan Pemasarakatan juga mendapatkan hak perawatan Jasmani dan Rohani. Untuk pembimbingan jasmani yang dapat dilakukan oleh pihak Lapas antara lain :

1. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi.

Warga binaan juga manusia yang perlu diperhatikan kesehatan dan perawatan jasmaninya. Salah satu upaya menjaga kesehatan jasmani WBP

adalah dengan menyediakan waktu dan fasilitas untuk berolahraga. Misalnya menyediakan lapangan bagi WBP untuk melakukan olahraga seperti lapangan bola, Lapangan Voli, senam secara terjadwal dan lain sebagainya.

2. Pemberian perlengkapan pakaian.

Perlengkapan pakaian ini seharusnya diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan meskipun dalam penerapannya hal ini jarang dilaksanakan. Namun walaupun sulit terealisasi hendaknya WBP tetap mendapatkan kualitas pakaian yang baik agar mereka dapat menjalani pembinaan dengan nyaman dan terhindar dari penyakit.

3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

WBP harus tetap mendapatkan fasilitas untuk mandi dan tidur yang layak. Namun kenyataannya banyak Lapas di Indonesia yang mengalami overcrowded. Akibat overcrowded ini, para narapidana tidak mendapatkan fasilitas tidur dan mandi yang layak. Keberhasilan dari pemasyarakatan dapat dilihat dari mantan narapidana yang telah selesai menjalankan masa pidananya dan dinyatakan bebas. Jika proses pemasyarakatan berjalan sesuai rencana maka hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tercatat dalam tujuan sistem pemasyarakatan. adapun mengenai tujuan sistem pemasyarakatan ini dapat kita lihat dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. adapun tujuan tersebut yaitu “Pembentukan sistem pemasyarakatan adalah agar Pembantu Narapidana menjadi manusiawi sepenuhnya, sadar akan kesalahan, meningkatkan kemampuannya, dan menghindari kejahatan yang berulang, sehingga masyarakat dapat menerimanya, dapat berperan aktif

dalam pembangunan, dan menjadi warga negara yang baik. tentu saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tahapan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Mengenai tahap penyuluhan bagi narapidana serta pendidikan dan kesehatan, tujuannya adalah untuk mempersiapkan narapidana serta pendidikan dan kesehatan, agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat, sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kemudian, sebagai manusia, narapidana juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses pembinaannya. Pelaksanaan mengenai hak-hak narapidana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam PP ini diatur tentang pelaksanaan hak bagi WBP. Kemudian untuk hak-hak narapidana sendiri termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ilham, A. R. (2020). SEJARAH DAN PERKEMBANGANKONSEP KEPENJARAAN MENJADI PEMASYARAKATAN. *Historis*, 9.

Situmorang, V. H. (2019). LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM (Correctional Institution as Part of Law Enforcement) . 86.

Soemadi Praja, R. Ahmad S, dan Romly Atmosasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta.

Sulhin, I. (2010). FILSAFAT (SISTEM) PEMASYARAKATAN . *jurnal kriminologi indonesai*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 TENTANG perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.